

BAB IV

KIPRAH MAS'UD YUNUS DALAM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

A. Keterlibatan dalam Politik.

Pemerintahan orde baru menerapkan strategi politik yang tidak aspiratif terhadap golongan Islam. Rezim Orde Baru menekan politik umat Islam dengan tujuan membonsai kekuatan politik Islam yang dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan rezim Orde Baru. Akibatnya partai politik yang bernuansa Islam tidak dapat menandingi kekuatan Orde Baru.

Politik orde baru ini disebut juga depolitisasi Islam. Depolitisasi Islam mencapai puncak berkenaan dengan partai-partai Islam mengelompok menjadi satu dalam partai PPP.⁵⁰ seperti partai NU, PSII (Partai Serikat Islam Indonesia), Perti, dan Permusi mengerucut menjadi satu dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada era reformasi masyarakat sangat membutuhkan figur seorang pemimpin yang mampu memberikan kesejahteraan bagi mereka. Figur Mas'ud Yunus duduk sebagai pejabat pemerintah bukan semata-mata tanpa melewati tangga kehidupan yang berliku.

Pada tahun 1977-1982 Mas'ud Yunus aktif di PPP. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai ketua Komisaris kota. Dia sangat dikenal di kalangan masyarakat dan berbekal ilmu pengetahuan yang mumpuni. Pada pemilu tahun

⁵⁰ Deliar Noer, "Islam Radikal" (Jakarta: Teraju, 2002) 31

1982 dia ditawarkan menjadi calon anggota DPRD dari PPP.⁵¹ Hal ini tidak begitu saja diterima oleh Mas'ud Yunus, akan tetapi dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan sang guru K.H. Ahyat Chalimy, pada waktu itu gurunya tidak memberi izin untuk maju dalam pemilu Legislatif. Saran yang diberikan kepada Mas'ud Yunus agar tetap menjalankan aktifitasnya dalam bidang dakwah.⁵²

Berdasarkan hasil musyawarah dengan gurunya, dia menolak tawaran menjadi calon Legislatif. Menurut sebagian orang adalah tawaran yang menggiurkan. Pada tahun 2003-2005 Mas'ud Yunus pernah aktif di PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). PKB di tingkat kabupaten Mojokerto, dia pernah menjabat sebagai ketua dewan Syuro Kabupaten Mojokerto periode 2003-2005.

B. Perjalanan Menduduki Jabatan Pemerintahan

Pemilu walikota Mojokerto tahun 2008, pasangan Abdul Gani Soehartono dengan Mas'ud Yunus unggul 68% suara. Oleh karena itu pasangan yang diusung oleh PDIP dan didukung oleh 8 partai lainnya diantaranya adalah Partai Demokrat, PKNU, PPP, PDP, PBB, Hanura, PNI Marhanisme, dan Partai Pelopor ini berhasil duduk di kursi walikota dan wakil walikota Mojokerto.

Calon walikota/wakil walikota nomor urut pertama adalah pasangan Hendro Suwono dengan Soehartono (H2O). Kedua pasangan ini diusung oleh Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasangan ini memperoleh suara sebanyak 15 %.

⁵¹ Wawancara dengan KH. Mas'ud Yunus 06 Desember 2011. di Kantor Walikota Mojokerto.

⁵² Iklan kota Mojokerto" Profil Tokoh" edisi 3/1 November 2011/hal 4 Jawaban KH. Mas'ud Yunus ketika menerima tawaran wakil walikota Mojokerto 21 Oktober 2008

Pada nomor urut tiga diisi oleh pasangan Diaz Roychan dan Syaifuddin Annafaby (DiFa). Pasangan ini disung oleh partai koalisi pelangi yaitu PPP, PKPI, PP (Partai Patriot), dan PDS. Pasangan ini memperoleh suara sebanyak 4%.

Pasangan terakhir diisi oleh pasangan Djoni Soedjatmoko dan Abdullah Fanani (Sunan). Partai yang mengusung adalah Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Perolehan suara mencapai 13%.

Di bawah ini adalah hasil suara pada masa pilwalikota Mojokerto:

Kecamatan Magersari

Kelurahan	H2O	AnnurMas	DiFa	Sunan
Wates	1.675	6.185	332	1.381
Gunung Gedangan	368	3.041	30	290
Kedundung	1.210	4.157	139	1.111
Gedongan	138	886	46	146
Jagalan	399	931	36	185
Magersari	385	1.606	344	399
Balongsari	546	2.911	93	626
Meri	538	2.806	96	311
Purwotengah	99	816	20	154
Sentanan	501	654	25	65
Jumlah	5.857	23.793	1.161	4.668

*)Sumber.PPS Kelurahan

Kecamatan Prajurit Kulon

Kelurahan	H2O	AnnurMas	DiFa	Sunan
Mentian	310	2.009	301	715
Prajurit Kulon	114	2.587	134	354
Pulorejo	528	2.678	80	457
Kauman	209	1.043	144	246
Surodinawan	372	1.984	59	563
Blooto	517	1.966	60	530
Miji	541	3.590	127	417
Kranggan	890	4.616	181	554
TPS Khusus	17	43	2	10
Jumlah	3.798	20.546	1.088	3.936

*) Sumber. PPS Kelurahan dan PPK Prajurit Kulon

Dalam masyarakat yang religius banyak dijumpai tokoh agama seperti kiai. Para tokoh agama ini sangat dihormati, disegani, dipercaya dan dipatuhi oleh masyarakat. Banyak tokoh agama yang digaet oleh partai-partai besar untuk menjadi pengurus partai politik tertentu ataupun maju dalam pemilu. Alasan sejumlah partai politik mendekati tokoh agama (kiai), karena ada kecenderungan bagi masyarakat untuk mengikuti pilihan politik ulama atau kiaiinya. Sebuah partai tertentu biasanya memiliki satu atau beberapa kelompok massa andalan. Kelompok ini merupakan tambang emas perolehan suara. Kelompok massa yang mempunyai preferensi kuat dan selalu memilih suatu partai tertentu disebut basis massa.

Namun seiring dengan berjalannya waktu dan semakin matangnya demokrasi di Indonesia, basis massa itu cenderung berkurang. Hal ini ditandai dengan meningkatnya proporsi pemilih yang menjatuhkan pilihan berdasarkan tawaran isu, kandidat, dan faktor situasional. Pendidikan politik pada masyarakat Sekarang sudah cukup baik. Hal ini terbukti dari sikap politik sebagian anggota masyarakat. Saat ini masyarakat mampu memilah semua janji yang disampaikan oleh partai politik peserta Pemilu ketika kampanye, dan ketika menjelang Pemilu berlangsung masyarakat melakukan penyaringan (filter) terhadap janji partai politik yang sekiranya dapat diwujudkan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yaitu yang menyangkut kebutuhan sosial secara umum. Setelah Pemilu berakhir dan partai politik yang didukung atau dipilih oleh masyarakat benar-benar menang, maka masyarakat akan menanyakan (berani menagih) janji yang disampaikan partai politik tersebut sebelum Pemilu. Jika partai tersebut memenuhi janjinya, maka masyarakat akan loyal terhadap partai tersebut, tetapi jika partai yang menang mengingkari janjinya, masyarakat akan beralih memilih partai lain.

Mas'ud Yunus tidak asing lagi di telinga masyarakat Kota Mojokerto karena figurnya sebagai kiai dianggap masyarakat mampu menjadi pemimpin yang mampu menjadikan Kota Mojokerto lebih baik. Di samping itu, calon walikota/wakil walikota yang diusung PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yaitu Djoni Soedjatmoko dan Abdullah Fanani kurang dikenal oleh masyarakat Kota Mojokerto.

Adapun prioritas program pembangunan pasangan Abdul Gani Soehartono dan Mas'ud Yunus pada saat kampanye adalah sebagai berikut:⁵³

Pertama, peningkatan kapasitas birokrasi dan pelayanan publik, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan standar kualitas birokrat yang mumpuni dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi pelayan masyarakat.

Kedua, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesempatan dan layanan pendidikan bagi warga masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan bantuan berupa modal usaha bagi agar mereka tetap memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Sedangkan peningkatan kualitas kesehatan dengan memberikan jaminan kesehatan, agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan dengan baik. Di samping itu, menambah sarana dan prasarana kesehatan.

Ketiga, peningkatan kapasitas atas hukum, keamanan, stabilitas dan partisipasi politik. Tujuannya program ini adalah untuk mewujudkan sistem keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Keempat, peningkatan kerukunan antar umat beragama dan solidaritas sosial. Tujuan program ini adalah untuk terwujudnya kerukunan internal antar umat beragama untuk mencapai keharmonisan sosial kemasyarakatan.

Kelima, peningkatan kinerja penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan

⁵³ "Panggung Pemilu", Radar Mojokerto (16 Oktober 2008).27

keberdayaan ekonomi dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Keenam, pembangunan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan semakin mantapnya manajemen pembangunan infrastruktur perkotaan.

Ketujuh, peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam pembangunan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik.

C. Peranan dalam Pembangunan dan Kebijakan Pemerintahan

Berbagai program pembangunan telah dicanangkan untuk merealisasikan visi dan misi pasangan Abdul Gani Soehartono dan Mas'ud Yunus. Mulai dari tahun pertama dan kedua sudah terlihat dalam meningkatkan pembangunan dalam bidang pendidikan, keagamaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat yang cerdas dan mempunyai sumber daya manusia yang maju dan mandiri.

Memasuki tahun ketiga kepemimpinan Abdul Gani Soehartono dan Mas'ud Yunus menunjukkan prestasi yang bagus. Mereka sukses dalam berbagai tugas menjadi nakhoda wilayah. Urusan keagamaan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan menjadi garapan Mas'ud Yunus. Sementara persoalan pembangunan infrastruktur, lobi ke pemerintah pusat serta hubungan kemasyarakatan lebih banyak digarap oleh Abdul Gani Soehartono.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan KH. Mas'ud Yunus 29 Februari 2012, di Kantor Walikota Mojokerto.

Kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Mojokerto:

a. Dalam Bidang Agama

Dalam bidang keagamaan, Mas'ud Yunus rutin menggelar pengajian di rumah dinas dengan lebel” Ngaji Bareng Kiai ‘Ud”, Materi pengajian ini adalah kumpulan hadis pilihan. "Ini bagian dari upaya mewujudkan Kota Mojokerto bermoral. Pengajian rutin ini dimulai setelah menempati rumah dinas di jalan Pemuda Kota Mojokerto. Sebagaimana dalam pencalonannya mendampingi Abdul Gani Soehartono, pasangan ini mengusung visi dan misi mewujudkan Kota Mojokerto sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral. Empat hal itu terus dilontarkan dalam setiap kampanyenya dulu. Dengan memberi siraman rohani diharapkan masyarakat Kota Mojokerto mampu menjadi masyarakat yang bermoral. Mas'ud Yunus juga membudayakan shalat Dhuhur berjamaah di Masjid Pemkot Mojokerto, serta khataman Al-Qur'an satu bulan sekali di Masjid Pemkot.

b. Dalam Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Bagi warga miskin, pendidikan terkesan mahal. Maka peranan Mas'ud Yunus menanggapi hal ini dengan membentuk BAZ (Badan Amil Zakat) kota Mojokerto. Program ini dicanangkan sebagai bentuk kebijakan pemkot yang peduli pendidikan, yakni zakat, infaq, shadaqoh dan peduli sesama, terutama difokuskan untuk menyekolahkan warga miskin kota Mojokerto.⁵⁵

⁵⁵ "Iklan kota Mojokerto" Profil Tokoh" edisi 3/1 November 2011/hal 4

BAZ juga menopang kebutuhan warga miskin. Sasaran penyaluran dari BAZ ini adalah warga miskin. Peran BAZ secara periodik menyalurkan bantuan pendidikan, mulai dari uang sekolah, seragam maupun uang saku.

Di samping itu, peran BAZ ini juga membantu orang tua siswa yang kurang mampu dalam membiayai anaknya sekolah dengan memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga. Dana BAZ ini bersumber dari PNS lingkup Pemkot Mojokerto dan BUMN. Implementasi BAZ ini adalah mengcover pendidikan bagi warga miskin.

c. Dalam Bidang Pendidikan

Pengembangan pendidikan di kota Mojokerto, dilakukan pencananagan program kota Mojokerto berlingkungan pendidikan (KMBP). Program ini menghasilkan kebijakan terkait peningkatan mutu pendidikan. Salah satu program yang baru adalah adanya program wajib belajar. Jam wajib belajar bagi pelajar mulai pukul 18.00-19.00 WIB. Selama satu jam tersebut, Mas'ud Yunus mewajibkan bagi orang tua yang memiliki anak sekolah supaya tidak menyalakan televisi. Dalam waktu bersamaan Satgas jam wajib belajar berkeliling wilayah untuk memantau apakah masih ada warga yang menyalakan televisi, persewaan PS yang masih beroperasi, ataupun bunyi audio. Di samping itu, saat ini ada program wajib mengaji yang dikhususkan bagi anak-anak pelajar, supaya mereka bisa mengaji. Program ini akan masuk pada KDK (Kecakapan Dasar Keagamaan) yang menjadi syarat kelulusan.

Hasil program ini sangat baik, program wajib belajar yang digulirkan oleh pemerintah Kota Mojokerto berhasil masuk 10 besar terbaik penyelenggara

pemerintah daerah (Pemda) tingkat nasional. Departemen Dalam Negeri (Depdagri) menilai program wajib belajar ini belum pernah ada di Indonesia. Selain itu, program ini memberikan partisipasi yang tinggi bagi masyarakat dalam mendorong semangat siswa menggunakan waktu untuk belajar.” Selain karena Mas’ud Yunus ikut terjun langsung di masyarakat bersama satgas jam wajib belajar, keunikan lain program ini adalah karena hanya dijumpai di Kota Mojokerto dari seluruh wilayah Indonesia”.⁵⁶

Pemkot Mojokerto menata kembali peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) warganya sesuai dengan visi pasangan Abdul Gani Soehartono dan Mas’ud Yunus saat mencalonkan diri menjadi walikota dan wakil walikota Mojokerto yakni mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, sejahtera, dan bermoral.

d. Dalam Bidang Keamanan

Semakin meningkatnya jumlah kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan kenakalan remaja di kota Mojokerto, Mas’ud Yunus membentuk satgas anti narkoba. Pembentukan tim atau satgas anti narkoba dilakukan untuk mengawasi siswa tingkat SMP, SMA/SMK negeri dan swasta se Kota Mojokerto.

Tujuan pembentukan Satgas anti narkoba ini untuk mengantisipasi maraknya penggunaan narkoba dimana pelakunya didominasi oleh anak-anak usia remaja yang bersekolah di tingkat SMP, dan SMA.

Oleh karena itu, pendidikan karakter bangsa sangat penting untuk anak. Mas’ud Yunus menghimbau pembentukan Satgas anti narkoba ini bisa dilakukan

⁵⁶ Ungkapan Hasanuddin Hutahuruk, SE, MSi (Dari kementerian dalam Negeri) saat memberikan evaluasi hasil penilaian dalam Berita Mojokerto Kota 24 April 2011

lewat tiga media yaitu terintegrasi melalui pelajaran, jika memungkinkan dimasukkan dalam kurikulum, dan lewat pengembangan diri seperti pada kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka dan sebagainya.

Sementara itu Kapolresta AKBP Iwan Kurniawan, mendukung wawasan tentang pembentukan satgas anti narkoba ini. Fenomena yang terjadi adalah para pengguna narkoba statusnya telah meningkat tidak hanya jadi pemakai, tapi juga menjadi distributor, bahkan produsen narkoba. Banyak yang tak menyangka suatu tempat bisa jadi pabrik narkoba, sama seperti ada yang tak menduga anak-anaknya bisa menjadi pemakai. Fakta ini berarti para pelaku pandai menyembunyikan tabiatnya, oleh karenanya harus dideteksi sejak awal pengguna narkoba untuk proses pencegahan.

Mas'ud Yunus menyampaikan keprihatinannya tentang penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja yang semakin meningkat tiap tahunnya. "Ini merupakan tugas bersama, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, untuk meminimalisir dan memberantas narkoba, miras, pornografi dan pornoaksi untuk menyelamatkan generasi muda kota Mojokerto.⁵⁷ Harapannya dengan adanya Satgas anti narkoba ini mampu bekerja dengan baik dan nyata sehingga mampu mewujudkan cita-cita masyarakat kota Mojokerto yang sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral.

e. Bidang Kesehatan

Pemerintah Kota Mojokerto berencana akan melaksanakan *total coverage* (cakupan) bagi seluruh penduduk Kota Mojokerto. *Total Coverage* ini

⁵⁷ Ungkapan Mas'ud Yunus saat sosialisasi pembentukan Satgas anti narkoba dalam berita Mojokerto Kota, Jumat dalam berita Mojokerto Kota 18 November 2011

berupa jaminan sosial kesehatan kepada seluruh penduduk Kota Mojokerto yang tidak memiliki Askes bagi PNS dan yang tidak memiliki Jamsostek bagi perusahaan serta di luar pemegang kartu Jamkesmas dan Jamkesmasda. Dari jumlah penduduk Kota sekitar 130 ribu jiwa, ternyata masih ada sekitar 81 ribu penduduk yang belum memiliki jaminan sosial kesehatan. Mas'ud Yunus menegaskan pentingnya validasi dan kelengkapan data program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda), terutama di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes). Validasi itu akan mempengaruhi program yang diharapkan bisa tepat sasaran dan menghindari kekeliruan pengucuran program tersebut ke orang yang sebenarnya kurang berhak. Sebagai contoh, yakni kasus waktu akan menyalurkan zakat kepada orang miskin, ternyata orang tersebut malah naik haji. Sementara itu, untuk melayani orang miskin harus dengan pendekatan hati, bukan dengan rasio saja.⁵⁸

Selain itu, Mas'ud juga menegaskan, upaya pelayanan baik di rumah sakit maupun Puskesmas, yang harus secara konvensional dan menerapkan kinerja istimewa bermakna. Aparatur harus punya nilai tambah di bidang kesehatan, tahu bagaimana melayani pasien dengan kondisi labil. Karena biasanya orang yang sakit kejiwaannya labil, emosi lebih menonjol daripada logika. Kalau perlu ada pelatihan bagi petugas masalah psikologis.

Mas'ud Yunus menjelaskan bahwa selama pembangunan Rumah sakit kelas B di Surodinawan telah menghabiskan dana sebesar Rp. 10 M berasal dari

⁵⁸ Ungkap Mas'ud Yunus, saat membuka rapat koordinasi yang diikuti jajaran Dinkes, RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, PT Askes, Puskesmas, Camat, dan instansi terkait di ruang Nusantara Balai Kota Mojokerto, dalam Berita Mojokerto Kota Senin 7 November 2011

APBD Kota. Selama ini setiap tahun Pemkot mengalokasikan dana sebesar Rp.30 M. Tahun 2012 diperkirakan Rumah sakit tersebut sudah selesai. Jika dihitung untuk kebutuhan jaminan kesehatan (Askes) bagi 81 ribu penduduk diperlukan anggaran sebesar Rp. 7,5 M. Maka dibanding dengan alokasi Rp. 30 M yang sudah tidak terserap lagi dapat dilokasikan untuk Askes Rp. 7,5 M, masih sangat memungkinkan dan ini tergantung komitmen bersama. “selambat-lambatnya tahun 2013 – 2014 *total coverage* ini dapat dilaksanakan sehingga semua warga Kota Mojokerto dapat memiliki jaminan kesehatan”.⁵⁹

Untuk mewujudkan hal tersebut, Mas’ud Yunus menghimbau kepada semua pihak termasuk RT/RW membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan semua program terkait dengan visi dan misi pemerintah Kota Mojokerto yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral. Jika ada persoalan terkait dengan empat bidang tersebut kepada ketua RT/RW dapat berkonsultasi kepada Lurah untuk mencari penyelesaian.

f. Bidang Perekonomian

Pemerintah Kota Mojokerto di bawah kepemimpinan Abdul Gani Soehartono dan Mas’ud Yunus telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam pembangunan di segala bidang. Termasuk telah berhasil meningkatkan perekonomian kearah yang lebih baik, pengendalian di bidang kesehatan dengan penerapan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) serta kebijakan program

⁵⁹ Sambutan Mas’ud Yunus waktu pembinaan tentang tugas dan fungsi ketua RT/RW sekota Mojokerto bertempat di Astoria Convention Hall Mojokerto dalam Berita Mojokerto Kota . 17 November 2011

Jamkesmas atau Jamkesda yang telah berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Mojokerto telah berhasil mengurangi angka pengangguran ke titik yang paling rendah dan tersukses diseluruh wilayah Jawa Timur.

Untuk melanjutkan pemerataan pembangunan di segala bidang serta semangat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Mojokerto, telah diselenggarakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) untuk tahun 2013. Pelaksanaan Musrenbang itu sendiri sudah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomer 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan Musrenbang mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting serta strategis dalam mengefektifkan dan mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan Kota Mojokerto, terutama dalam rangka untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan untuk pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Termasuk kebijakan Pemerintah Kota dalam menampung segala aspirasi yang telah disampaikan oleh semua lapisan masyarakat Kota Mojokerto.

Tujuan utama Pemerintah Kota Mojokerto menyelenggarakan Musrenbang RKPD Tahun 2013 adalah pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kota Mojokerto dan penyerapan semua aspirasi masyarakat demi kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto. Hal ini juga sesuai dengan visi yang

telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dibawah kepemimpinan Abdul Gani Soehartono dan Mas'ud Yunus Wakil, yaitu terwujudnya Kota Mojokerto yang mandiri, demokratis, adil, makmur dan bermartabat.

Musrenbang itu sendiri juga mendukung misi pembangunan daerah Kota Mojokerto sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM.
3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional, dan adil dalam melayani masyarakat.
4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan.
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi Nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila.
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan.
7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 bertujuan :

1. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Mojokerto dengan arah kebijakan, dengan prioritas peningkatan kesejahteraan

masyarakat Kota Mojokerto dan sasaran pembangunan provinsi Jawa Timur.

2. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan atau berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat Kota Mojokerto kepada Pemerintah Kota Mojokerto pada saat Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.
3. Mempertajam indicator kinerja program dan kegiatan prioritas kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto.
4. Menyetakati prioritas pembangunan serta program dan kegiatan Kota Mojokerto.

Pelaksanaan Musrenbang ini sudah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomer 25 Tahun 2004, juga untuk menyerap segala aspirasi warga Kota Mojokerto, disamping itu adanya penataan yang lebih baik untuk PKL dan para pedagang pasar, yang pada akhirnya demi kesejahteraan masyarakat.

Kepedulian juga ditunjukkan oleh pemerintah kota terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima) dan para pedagang di pasar dengan menyiapkan tempat yang lebih baik bagi para PKL yang ada diseluruh Kota Mojokerto. Untuk para pedagang di pasar, Pemerintah Kota telah membangun berbagai sarana prasarana pasar, salah satunya adalah pembangunan pasar ikan di Pasar Prajuritkulon. Dengan memberikan tempat yang lebih luas dan baik serta nyaman serta penataan, baik para PKL maupun pedagang pasar, Pemerintah Kota Mojokerto berharap agar mereka dapat menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan dan kenyamanan serta dapat meningkatkan hasil usahanya masing-masing, sehingga bersama-sama dengan Pemerintah Kota untuk menciptakan kota yang bersih, sehat, nyaman.

aman dan sejahtera. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan khususnya UPTD pasar diminta agar dapat mengatur, membina dan memfasilitasi kebutuhan pedagang di pasar ini sehingga pelayanan masyarakat bisa optimal. Saat ini juga banyak bermunculan pasar modern seperti *Carrefour*, *Alfa*, *Indomart* dan swalayan lain yang juga menjual sama seperti pasar ini.

Bukti nyata salah satu lagi bentuk rasa kepedulian Pemerintah Kota Mojokerto terhadap para PKL (Pedagang Kaki Lima), dan bertepatan dengan HUT Himpunan Pedagang Asongan Mojokerto (HIPAM) ke-16, yang digelar Selasa, 20 Maret 2011 yang bertempat di alun-alon Kota Mojokerto, Pemerintah Kota telah memberikan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada 241 PKL alun-alon kota. Pemberian Kartu Tanda Anggota ini bertujuan untuk penataan yang lebih baik dalam kesatuan wadah yang sudah dikoordinir oleh para pengurus HIPAM.

Dengan adanya hubungan yang baik antara para PKL dengan pemerintah kota, akan menambah rasa kebersamaan dalam menjaga kebersihan serta keindahan taman kota khususnya di wilayah alun-alon kota. Dalam menyambut penilaian adipura, pemerintah kota telah bekerja secara maksimal untuk penataan taman kota, ruas-ruas jalan serta pembenahan sarana dan prasarana dalam menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman, termasuk juga dengan menjalin hubungan baik dengan para PKL yang ada diseluruh wilayah Kota Mojokerto, salah satunya para PKL yang ada di alun-alon kota Mojokerto.

Di samping itu, dengan adanya Kartu Tanda Anggota bagi para PKL, akan lebih mudah untuk mengatur, mengkoordinir serta memberi arahan. tentang pentingnya rasa kebersamaan untuk meningkatkan usahanya dan menjaga

kebersihan, ketertiban serta nyaman bagi para PKL sendiri maupun bagi para pembeli.⁶⁰

⁶⁰"Bacaan Arek Jawa Timur",Harian Bangsa 28 Maret 2012